

URGENSI NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

Yovenska L. Man

Dosen Syariah IAIN Bengkulu
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: yovens_ka@yahoo.co.id

Abstract: As the largest Islamic mass organization in Indonesia, Nahdatul ulama certainly has enormous urgency in building a government in Indonesia. There are a lot of roles and services contributed by the ulema of the Indonesian state both in terms of social, political, educational and economic aspects. From the social side, the role of the ulama's ulema is seen as an effort to reaffirm all actual religious and social traditions that have institutionalized in a network of established structures and leadership patterns. From the political side, the ulema became the front guard's guard to maintain the integrity of the NKRI from a dangerous understanding. The journey of Nahdlatul Ulama, which initially had a lot of practical politics, then changed direction by focusing on religious social activities. In the world of education nahdatul uluma also contributes to the enormous service in educating Indonesian children, among others by establishing formal and informal educational institutions. In terms of the people's economy, the ulama took part in increasing the level of the economy of the Indonesian people with the establishment of shari'ah-based financial institutions.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Indonesian Government

Abstrak: Sebagai ormas islam terbesar di indonesia, Nahdatul ulama tentu memiliki urgensi yang sangat besar dalam membangun pemerintahan di indonesia. Banyak sekali peran dan jasa yang disumbangkan oleh nahdatul ulama bagi negara indonesia baik dari sisi aspek sosial, politik, pendidikan maupun dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial peranan nahdatul ulama terlihat upaya peneguhan kembali semua tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya telah melembaga dalam jaringan struktur dan pola kepemimpinan yang mapan. Dari sisi politik nahdatul ulama menjadi tonggak garda terdepan menjaga keutuhan NKRI dari paham paham yang berbahaya. Perjalanan Nahdlatul Ulama yang awalnya banyak bernafaskan politik Praktis, kemudian berganti haluan dengan menitik beratkan pada aktifitas sosial keagamaan. Dalam dunia pendidikan nahdatul uluma ikut memberikan sumbangsih jasa yang sangat besar dalam mencerdaskan anak bangsa indonesia, antara lain dengan mendirikan lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Dalam aspek ekonomi kerakyatanpun nahdatul ulama ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian rakyat indonesia dengan didirikannya lembaga lembaga keuangan yang berbasis syari'ah.

Kata kunci : Nahdlatul Ulama, Pemerintahan Indonesia

Pendahuluan

Nahdlatul ulama merupakan ormas islam terbesar di indonesia. Potensi yang besar ini jika dimanfaatkan dengan maksimal bisa memberikan efek positif dalam pembangunan indonesia. Peranan yang sangat urgen ini telah dipikul dan dilaksanakan oleh ormas nahdlatul ulama selama puluhan tahun semenjak organisasi ini didirikan oleh kyai Hasyim Asy'ari. Berdirinya Nahdlatul Ulama diprakarsai oleh lima belas kiai terkemuka, mereka berkumpul di rumah K.H. Wahab Hasbullah di Kertopaten Surabaya, sebagian besar mereka datang dari Jawa Timur dan masing-masing adalah tokoh pesantren. Jarang terjadi kiai senior berkumpul dalam jumlah sebanyak itu, namun dalam kesempatan ini mereka memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan kepentingan mereka dalam bentuk Islam tradisionalis yang mereka praktekkan setelah melalui diskusi, mereka memutuskan Nahdlatul Ulama tersebut untuk mewakili dan memperkokoh Islam tradisionalis di Hindia Belanda. Keputusan ini merupakan langkah bersejarah karena merupakan organisasi yang berskala Nasional (Fealy, 2003: 21-22).

Nahdlatul Ulama didirikan oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur, pembentukannya sebagai reaksi satu sisi terhadap berbagai aktivitas kelompok Reformis,

Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Sarekat Islam, sisi lain terhadap perkembangan politik dan paham keagamaan tingkat internasional, oleh karenanya ada tiga penyebab lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu (1) gerakan pembaharu di Indonesia (2) kepentingan Politik atau (3) perkembangan timur tengah.¹

Adapun dari segi religius dan spiritualitas, proses berdirinya Nahdlatul Ulama melalui *istikharah* dan permohonan kepada Allah. K.H. As'ad Syamsul Arifin yang mempunyai peran penting sebagai mediator dari dimensi spiritual dan proses berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau menggambarkan betapa beratnya mendirikan *jamiyyah* ulama, hingga K. H Kholil Bangkalan perlu dua kali Mengutus dirinya pergi ke Tebuireng Jombang untuk menyampaikan sesuatu (pelambang-pelambang) Kepada K.H. Hasyim Asy'ari. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak melalui Proses administratif melainkan melalui permohonan kepada Allah. Ketika itu K.H. Wahab memberikan usulan kepada K.H. Hasyim untuk membentuk jam'iyah para ulama, K.H. Hasyim As'ari minta petunjuk kepada Allah, namun petunjuk tersebut tak kunjung tiba, akan tetapi petunjuk itu *malah* datangnya dari sang guru K.H. Kholil

¹ Shobron, Sudarno. 2009). *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional*. (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2009) h. 37-38

Bangkalan. K.H. As'ad berperan sebagai mediator untuk mengantarkan *Isyarah* dari K.H Kholil kepada K.H. Hasyim Asy'ari. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1924, beliau disuruh menyampaikan sebilah tongkat disertai pesan dari al-Quran surat Thaha ayat 17-23, setelah sampai dihadapan K.H. Hasyim As'ari, K.H. As'ad Dan pada tahun 1925 beliau disuruh menghantarkan sebuah tasbih dan serta bacaan Asmaul Husna *Ya Jabbar dan Ya Qohhar* tiga kali kepada K.H Hasyim, inilah proses dari dimensi spiritual tentang berdirinya Nahdlatul Ulama (Basri, Hasan:2003:09).

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan, ke-Islaman organisasi ini dirintis para kiai yang berpaham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, sebagai wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk salah satu imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta berkidmat kepada bangsa, Negara dan umat Islam.²

A. Peran Nahdlatul Ulama dalam Sosial Pemerintahan

Dari dimensi sosial keberadaan Nahdlatul Ulama merupakan upaya peneguhan kembali semua tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya

telah melembaga dalam jaringan struktur dan pola kepemimpinan yang mapan. Lembaga-lembaga pesantren, kiai, santri, dan jamaah yang tersebar di tanah air sebagai unit komunitas sosial budaya masyarakat Islam, menjadikan Nahdlatul Ulama tidak terlalu sulit dalam menyebarkan sayap organisasinya. Hubungan kekerabatan kiai sendiri dalam lingkungan pesantren di Jawa sangat membantu penyebaran sampai ke daerah-daerah. Sifat penyatuan lingkungan itu akan menimbulkan interaksi sosial antara pesantren dengan penduduk setempat serta membentuk pola kepemimpinan sosial yang berpusat pada kiai (Haider, 1998: 83-84).

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang lebih menonjolkan sifat keulamaan dalam arti kepengurusan organisasinya terdiri dari kalangan ulama atau kiai. Sedang ulama dan kiai sendiri umumnya bekerja dibidang pertanian yang menetap, walaupun mereka berdagang mobilitas mereka juga kurang intensif seperti umumnya pedagang luar jawa. Sejak abad lalu kiai merupakan sisi penting dalam kehidupan tradisional petani di pedesaan. Keresahan petani akibat tekanan pemerintah kolonial sepanjang abad lalu menemukan legitimasi perjuangan mereka setelah mendapat ayoman kepemimpinan ulama melancarkan protes mereka. Harry J

² Moesa, Ali Maschan, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*. (Surabaya: LEPKISS Muchtar, 1999) h. 86

Benda menggambarkan pada masa itu sebagai akibat dari landasan ikatan-ikatan tradisional, petani semakin mengambang dan disisi lain nilai-nilai priyayi mulai surut di bawah pengaruh Westernisasi, maka ulama mengambil peran serta menempati posisi sentral sebagai pusat protes (Haidar, 1998:87).

Benda dalam Haidar (1998:87) menyatakan bahwa gerakan Syarikat Islam yang muncul sejak dekade kedua pada abad ini lebih banyak bergerak dibidang sosial dari pada ideologi. Dengan memanfaatkan kontrol administratif Belanda yang tidak terlalu ketat, dan prestise priyayi yang semakin melemah para pemimpin Syarikat Islam telah menerobos desa-desa terpencil di pulau Jawa yang membuatnya menjadi juru bicara *maliese* sosial yang lantang dari penduduk petani Jawa dan menghasutnya melewati para pemimpin agama yang tradisional untuk memberontak melawan kekuasaan yang sedang berlangsung, walaupun pemberontakan itu sifatnya aborsi atau bunuh diri.

Sekitar awal sampai pertengahan tahun tiga puluhan Nahdlatul Ulama mengembangkan mitos perjuangan keadilan sosial, sehingga sejumlah lulusan pendidikan di Tuban terlibat dalam pemberontakan Partai Komunis

Indonesia di Madiun tahun 1945 yang mereka anggap sebagai perjuangan membela kaum miskin yang tertindas. Sejumlah lulusan pesantren sendiri tidak sedikit yang kemudian menggabungkan diri kedalam gerakan PESINDO yang beraliran *kiri* kerana mengesankan perjuangan membela kaum petani miskin lemah. Ketika akhir dekade kedua, Nahdlatul Ulama mengadakan kursus perjuangan sebagai salah satu bagian dari kegiatan organisasi yang dibentuk, *Nahdlatul Wathan* dan *Taswirul Afkar*, serta ketika akan membentuk Nahdlatul Ulama, nampak alur orientasi yang jelas untuk menggalang persatuan dan solidaritas umat Islam dan meperkokoh kualitas kehidupan sosial serta menegakkan keadilan sosial yang dilambangkan dalam persatuan ulama membela tradisi keagamaan yang telah hidup ditengah masyarakat. Mitos ulama sebagai pembawa panji pembela kaum tani miskin yang tertindas akibat kebijakan pemerintah kolonial merupakan salah satu faktor penting naiknya gengsi Nahdlatul Ulama ditengah pergulatan perjuangan mereka, sebab umumnya para kiai dan pesantren senantiasa berada ditengah masyarakat pedesaan (Haidar, 1998:89-90).

B. Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik

Perjalanan Nahdlatul Ulama yang awalnya banyak bernafaskan politik Praktis, kemudian berganti haluan dengan menitik beratkan pada aktifitas sosial keagamaan. Semangat paling awal itu adalah semangat melakukan aktivitas-aktivitas sosial keagamaan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama sendiri yang pada waktu itu berdirinya dikenal masih berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Seperti tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun yang lalu, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan banyak diperankan para ulama ditengah-tengah masyarakat. Mereka menghabiskan waktunya untuk membimbing umat agar menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Mereka juga yang menjadi panutan bagi Nahdlatul Ulama dan memiliki kedudukan paling menentukan didalam organisasi yang didirikannya ini sebagaimana terealisasi pada masa-masa awal, baik secara legal formal maupun dalam prakteknya (Qomar, 2002:143).

Dari dimensi politik Nahdlatul Ulama secara historis dalam masyarakat Indonesia pasca kolonial adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan keagamaan. dalam perkembangannya semenjak didirikan pada tahun 1926

sampai hari ini, organisasi tersebut senantiasa tidak pernah lepas dari keterlibatan dalam proses politik baik langsung maupun tidak. Keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai parpol mulai tahun 1952 sampai dengan fungsi partai-partai Islam dalam PPP pada tahun 1973 menunjukkan sebuah rentetan pengalaman panjang dalam percaturan politik Indonesia dengan segala dinamika dan pasang surutnya (Dharwis, 1994:135).

Nahdlatul Ulama dan para pendukungnya memainkan peranan aktif dan radikal pada masa perjuangan, yang mungkin sulit dicocokkan dengan reportasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang moderat dan kompromistis. Sepanjang dasawarsa akhir pemerintahan Belanda, Nahdlatul Ulama selalu memberikan kesetiiaanya kepada pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini sejalan dengan sikap Sunni tradisional bahwa pemerintahan yang membolehkan umat Islam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya lebih baik dari pada fitnah (*chaos*) yang diakibatkan pemberontak. Setelah perang Belanda masih percaya bahwa mereka dapat memulihkan keadaan sebagaimana sebelum perang dan mengharapkan para kiai (dan juga para tokoh Muhammadiyah) agar bersikap akomodatif sebagaimana sebelumnya.

Dalam upaya mempertahankan dan memperjuangkan revolusioner Nahdlatul Ulama menyatakan perjuangan tersebut sebagai *jihad* (perang suci). deklarasi ini kemudian dikenal sebagai “Resolusi Jihad” yang telah mampu menampilkan diri sebagai kekuatan radikal yang tidak disangka-sangka. Revolusi ini nampaknya merupakan pengakuan yang legitimasi bagi pemerintah sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya, dengan mengeluarkan “Resolusi Jihad”, dengan kritik implisitnya terhadap pemerintah Republik, Nahdlatul Ulama telah menampilkan dirinya sebagai kelompok radikal (Bruenessen, 1994:58-60).

Perjuangan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama tidak hanya setelah kemerdekaan namun setelah penjajahan keterlibatan dalam mempertahankan ideologi dan kebebasan juga dilakukan oleh warga Nahdliyin. Selain melakukan diplomasi, perlawanan dalam bentuk fisik juga dilancarkan pada jaman Jepang. Moesa (1999:76) menyatakan bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan para kiai telah memutuskan fatwa resolusi jihad yang mendorong rakyat Surabaya ikut serta dalam perang 10 November 1945. Isi keputusan tersebut adalah:

- Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17-8-1945 wajib dipertahankan.
- Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan dipertahankan meskipun harus mengorbankan harta dan nyawa
- Musuh Republik Indonesia terutama Belanda yang datang membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Amerika-Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk menjajah Indonesia
- Umat Islam terutama warga Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan sekutunya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
- Kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam (*fardlu ain*) yang berada dalam jarak radius sembilan puluh empat kilo meter (yakni dimana jarak umat Islam boleh sembahyang *Jama'* dan *Qoshar*). Adapun mereka yang berada diluar jarak tersebut wajib membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius sembilan puluh empat kilo meter tersebut.

Dalam pemilu pertama tahun 1955 Nahdlatul Ulama telah

menunjukkan kemampuan untuk menggalang solidaritas dikalangan kaum santri dan itu berarti memperjelas perjuangan mereka untuk memenangkan ideologi Islam sekaligus menunjukkan sikap anti-Komunis. Dari segi ini tampaknya tiga pilar utama yang menyangga kekuatan Nahdlatul Ulama yaitu Ulama, pesantren, dan politisi memegang peran penting atas keberhasilan Nahdlatul Ulama dalam pemilu tersebut. Dengan pola pendekatan dalam memperjuangkan berlakunya syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Nahdlatul Ulama hampir tak pernah menarik garis yang ekstrim hitam-putih dalam bidang ideologi, sebab pendekatan yang digunakan lebih bersifat praktis, parsial, dan gradual, setahap demi setahap sesuai dengan rentangan pemahaman keagamaan masyarakat yang masih beragam. Apa yang dirumuskan di pusat mengenai program dan aksi politik setelah sampai dilapangan akan mengalami perubahan keadaan hal ini berarti bahwa rumusan-rumusan program dan aksi politik tersebut diartikan menurut bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti masyarakat awam (Haidar 1998:169-170)

Setelah pemilihan umum 1955 usai, Nahdlatul Ulama harus menghadapi persoalan lain yang tak kurang beratnya. Sebagaimana telah disinggung bahwa

konstituante tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang dasar negara kemudian pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengatasi dengan dekrit yaitu kembali ke UUD 1945. Ketika terlihat tanda-tanda presiden akan memberlakukan kembali UUD 1945, Nahdlatul ulama tidak berdiam diri menantikan apa yang akan terjadi. Maka pada tanggal 26-28 Maret 1958 Nahdlatul Ulama mengadakan sidang umum dewan partai di Cipanas Bogor, dan berhasil merumuskan beberapa usul yang isinya menyetujui niat presiden kembali ke UUD 1945 yaitu dapat menerima UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia dengan pengertian: a) Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 tersebut pada keseluruhannya dan merupakan sumber hukum. b) Islam tetap menjadi perjuangan partai Nahdlatul Ulama. C) Hasil-hasil pleno konstituante tetap berlaku (Sitompul, 1989:149-150)

Tujuan politik Nahdlatul Ulama terdiri dari tiga bagian utama, di dalam teori sangat berhubungan dengan tujuan keagamaan. Pertama, menyalurkan dana pemerintah kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Kedua, berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah kepada Nahdlatul Ulama dan pendukungnya. Peluang seperti ini akan memberikan keuntungan langsung bagi mereka yang

mampu mendapat kedudukan dan dianggap membantu Islam dan umat pada umumnya. Semakin sejahtera anggota masyarakatnya semakin meningkat pula kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban sosial dan keagamaanya. Tujuan ketiga adalah, mendapatkan kedudukan bagi anggota Nahdlatul Ulama dalam birokrasi. Selama masa kolonial, kaum santri tradisional umumnya menjauhkan diri dari lembaga pemerintah dan mengembangkan usaha disektor swasta dan informal. Setelah kemerdekaan birokrasi dipandang sebagai jalan mobilitas dan status sosial. Masuknya muslim tradisional dalam birokrasi dipandang akan meningkatkan kedudukan Nahdlatul Ulama di masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat suara umat dikalangan pemerintah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal Nahdlatul Ulama perlu mengadakan reorientasi terhadap konsepnya di bidang sosial dan juga politik. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan harus mempunyai wawasan sosial politik, dengan tujuan diantaranya;

- a) Mengurangi pemutlakan paham keagamaan, dengan mencoba meninjau kembali “dogmatika kelompok” seperti halnya term aswaja tidak diarahkan

terhadap fanatisme berorganisasi dan tidak dimaksudkan sebagai pseudo agama atau ideologi, b) Mengusahakan pendidikan politik dikalangan warganya, terutama menyangkut keberadaan umat Islam dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, c) Harus bersifat respon, serta adanya komunikasi berkala maupun insidental dalam menyikapi isu-isu politik, terutama yang ada sangkut pautnya dengan umat Islam (Syamsudin, ed. Ilyas, 1994:101)

C. Peran Nahdlatul Ulama dalam Ekonomi dan Pendidikan

Dalam dimensi Ekonomi Nahdlatul Ulama telah membuat gerakan sosial ekonomi dengan nama *Nahdlatul Tujjar* yang merupakan keprihatinan atas tertinggalnya umat Islam di bidang ekonomi dan juga sosial dibandingkan dengan umat lain. Pada Mukhtar XIII yang dilaksanakan di Menes, membentuk terobosan baru dengan membentuk model ekonomi bersifat patungan dan gotong-royong yang dikenal dengan sebutan *syirkah muawwanah* yang sekarang yang digunakan oleh lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama yang dilakukan secara struktural baik dari pusat sampai daerah (Mughni, 2000:91)

Dalam dimensi Ekonomi Mughni berpendapat bahwa Nahdlatul Ulama telah membuat gerakan sosial

ekonomi dengan nama *Nahdlatul Tujjar* yang merupakan keprihatinan atas tertinggalnya umat Islam di bidang ekonomi dan juga sosial dibandingkan dengan umat lain. Pada Muktamar XIII yang dilaksanakan di Menes, membentuk terobosan baru dengan membentuk model ekonomi bersifat patungan dan gotong-royong yang dikenal dengan sebutan *syirkah muawwanah* yang sekarang yang digunakan oleh lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama yang dilakukan secara struktural baik dari pusat sampai daerah.

Bagi Moesa, Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai. Dengan demikian pesantren, Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat. Kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada umumnya. Sehingga kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Pembangunan nasional ternyata semakin menciptakan elitisme ditengah-tengah kemiskinan dan rendahnya pengetahuan serta penguasaan teknologi yang sangat terbatas. Pada saat yang bersamaan sebagai akibat perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan canggih, ternyata gejala globalisasi kehidupan dengan arus informasi telah menimbulkan erosi mental dan perubahan nilai-nilai serta sikap hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan *civil society* dalam aspek pendidikan Nahdlatul Ulama mempunyai tanggungjawab besar didalamnya. karena pendidikan adalah sektor yang sangat berpengaruh dan merupakan peran paling vital karena merupakan gerakan peningkatan sumber daya manusia. Dengan pendidikan akan terwujud tatanan sosial yang beradab, politik yang demokratis, ekonomi yang berkembang.

Dalam bidang pendidikan Nahdlatul Ulama merupakan manifestasi modern dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya dari para kiai. Dengan demikian pesantren, Nahdlatul Ulama dan para kiai sebagai sentral selalu mengaitkan diri dalam membentuk masyarakat, kekompakan itu merupakan lembaga yang mempunyai peran kuat dalam perkembangan Islam dan masyarakat Islam pada umumnya. Sehingga kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan melalui institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan.³

Pesantren adalah model pendidikan yang sama tuanya dengan

³ Moesa, Ali Maschan, *Kiai ...* h. 68.

Islam di Indonesia, jika dilihat dari keberadaannya, pesantren merupakan institusi pendidikan dan dakwah agama Islam. Ia lahir ditengah-tengah masyarakat yang belum mengenal sekolah dan universitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam wacana ini, menjalankan fungsi pendidikan merupakan tugas pokok dari semua pesantren. Sementara itu fungsi agama dalam kehidupan diharapkan menjadi faktor pencerahan dan langit pelindung (*the sacred canopy*) bagi kehidupan manusia. Pencerahan yang menumbuhkan kedamaian, keadilan, demokrasi, moralitas, dan pemenuhan hak dasar manusia serta tegaknya adiluhur dalam menghantarkan manusia kepintu gerbang *rahmatan lil'alam*.⁴

Ruba'i dalam Salim (1999:114-115) menyatakan bahwa pesantren memiliki potensi yang sangat besar antara lain:

1. Budaya paguyuban yang dimiliki dunia pesantren merupakan kekayaan yang mahal harganya kalau ini dikelola dengan bagus dan dipoles dengan berbagai pengetahuan modern, maka bukan hal yang mustahil, masyarakat dalam komunitas ini akan lebih mampu *survive*.
2. Masyarakat pesantren yang belum terlalu banyak tercemar oleh budaya global yang menyesatkan, akan memiliki ketajaman dan kejernihan hati maupun pikiran dibandingkan dengan masyarakat yang sudah relatif liberal. Potensi ini merupakan modal untuk mengembangkan khasanah keilmuan mereka
3. Masyarakat pesantren mewarisi budaya bangsa, sehingga mereka lebih memahami akar budaya bangsanya dan lebih mampu melakukan pendekatan berbasis masyarakat
4. Dengan bekal militansi dan kepatuhan yang mereka miliki dan didukung oleh budaya kebersamaan dan gotong royong yang kuat, pesantren berpotensi menjadi basis ekonomi kerakyatan.
5. Pesantren sebenarnya memiliki kemandirian dari intervensi pihak luar, seperti kekuasaan. Ini bisa dibuktikan misalnya, sistem pendidikan di setiap pesantren selalu berbeda-beda. Dalam sejarah pesantren di Indonesia belum ada sistem pesantren yang mampu menyeragamkannya. Apabila pesantren berani melakukan

⁴ Moesa, Ali Maschan, *Kiai ...* h. 299-301

rekontekstualisasi dan rekonstruksi ajaran dan sistem pendidikan serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam ajaran Islam, maka sesungguhnya pesantren bisa dijadikan miniatur kedaulatan dan demokrasi sebuah negara. Di beberapa pesantren hal ini tampaknya sudah mulai dirintis

Secara kultural pesantren merupakan embrio pendidikan Nahdlatul Ulama, akan tetapi komunitas pesantren masih memiliki keterbelakangan, oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren harus dilakukan langkah-langkah, antar lain: 1) Introspeksi diri atas pemahaman teologi aswaja, 2) Pengasuh pesantren hendaknya menjadi pioner dalam pengembangan pendidikan pesantren, yang tidak hanya menyenangkan umat tetapi juga mencerdaskannya, 3) Masyarakat pesantren harus segera melakukan transformasi nilai kepesantrenan, yaitu; keikhlas, kebersamaan, kemandirian, dan semangat pembaharuan, dan 4) Adanya hubungan timbal balik yang baik antara komunitas pesantren dengan aparaturnegara dalam segala bidang (Tirmidi, 1996:82-83)

Pada dasarnya pendidikan Islam pada umumnya, dan Nahdlatul Ulama pada khususnya senantiasa bersentuhan dan bergulat dengan realitas yang mengitarinya. Dalam perspektif historis

pergumulannya dengan sosio-kultural, menemui dua kemungkinan: Pertama, pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap sosio-kultural, dalam arti memberikan wawasan filosofi, arah pandangan motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru, Kedua, pendidikan Islam di pengaruhi oleh perubahan sosial dan lingkungan sosio-kultural, dalam penentuan sistem pendidikan, institusi dan pilihan-pilihan prioritas, juga eksistensi dan aktualisasi dirinya. Diharapkan tujuan pendidikan memperoleh keunggulan kualitas fikir dan kerja disamping kualitas moral dan pengabdian, atau di dalam istilah bahasa Al-qur'an mereka memiliki "*basthatan fil'ilmi wal jism*" disamping memiliki "*qolbun salim*" (M.Lutfi:Peran Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi)

Penutup

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nahdatul ulama adalah ormas islam terbesar di indonesia. Sebagai ormas terbesar, Nahdatul ulama tentu memiliki urgensi yang sangat besar dalam membangun pemerintahan di indonesia. Banyak sekali peran dan jasa yang disumbangkan oleh nahdatul ulama bagi negara indonesia

baik dari sisi aspek sosial, politik, pendidikan maupun dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial peranan nahdatul ulama terlihat upaya peneguhan kembali semua tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya telah melembaga dalam jaringan struktur dan pola kepemimpinan yang mapan. Dari sisi politik nahdatul ulama menjadi tonggak garda terdepan menjaga keutuhan NKRI dari paham paham yang berbahaya. Perjalanan Nahdlatul Ulama yang awalnya banyak bernafaskan politik Praktis, kemudian berganti haluan dengan menitik beratkan pada aktifitas sosial keagamaan. Dalam dunia pendidikan nahdatul ulama ikut memberikan sumbangsih jasa yang sangat besar dalam mencerdaskan anak bangsa indonesia, antara lain dengan mendirikan lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Dalam aspek ekonomi kerakyatanpun nahdatul ulama ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian rakyat indonesia dengan didirikannya lembaga lembaga keuangan yang berbasis syari'ah.

Pustaka Acuan

Budimansyah, Dasim, *Pembelajaran Pembudayaan Nilai Pancasila*. (Bandung : PT Genesindo, 2008)
Creswell., John W, *Research Design (Pendekatan Kualitatif,*

Kuantitatif, dan Mixed). (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

Feillard, Andree, *Nahdlatul Ulama dan Negara : Fleksibilitas, Legitimasi dan pembaharuan, dalam Ellyasa K.H Darwis (ed.), Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. (Yogyakarta. LKIS, 1999)

Kaelan, *Problem Epistemologis Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. (Yogyakarta : Paradigma, 2012)

Leavit, Harold J, *Psikologi Manajemen*. (Jakarta: Erlangga, 1997)

Marsudi, Subandi Al, *Pancasila dan UUD'45 Dalam Pradigma Reformasi Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Masyhudi, *Profil NU Jawa Timur*. (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2007)

Moerdiono dkk., *Pancasila Sebagai Ideologi*. (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992)

Moesa, Ali Maschan, *Kiai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*. (Surabaya: LEPKISS Muchtar, 1999)

Muchith, Abdul Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran (Refleksi 65 Tahun Ikut NU)*. (Surabaya: Khalista, 2006)

- Robbins, SP, *Educational Psychology*.
(New York: Henry Hooty & Co,
2001)
- Rofiq, Ainur Al-Amin, *Membongkar
Proyek Khilafah Ala Hizbut
Tahrir Di Indonesia*.
(Yogyakarta: LKIS, 2012)
- Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif
dan R&D*. (Bandung: Alfabeta
Shobron, Sudarno. 2009).
*Muhammadiyah dan NU Dalam
Pentas Politik Nasional*.
(Surakarta : Muhammadiyah
University Press, 2009)
- Syarbaini, Syahrial, *Implementasi
Pancasila Melalui pendidikan
Kewarganegaraan*. (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010)
- Syihabuddin, Mohammad, *Teologi Cinta
dan Kasih Implementasi dan
Aktualisasi Nilai-nilai
Ahlussunnah Waljamaah An-
Nahliyah*. Tuban: (Nahdliyin
Learning Center, 2013)
- Yusuf, Y, *Psikologi Lintas Budaya*.
(Bandung: PT Rosda Karya.
Wreksuhardjo, Sunarjo. 2001).
*Ilmu Pancasila Yuridis
Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat
Pancasila*. (Yogyakarta: Andi
Offset, 1991)